MEMAHAMI SEBUAH KONSEP INTEGRITAS

Dwi Prawani Sri Redjeki¹ dan Jefri Heridiansyah²

1. Dosen PNS DPK STIE SEMARANG
2. Dosen Tetap STIE SEMARANG

Abstraksi

Kajian manajemen sangat lekat dengan penggunaan istilah integritas, terutama dalam konteks kehidupan sebuah organisasi dan kepemimpinan. Meski demikian, banyak konseptualisasi istilah tersebut yang multitafsir dan bahkan rancu sebagai akibat penitikberatan pada perilaku atau karakter tertentu, termasuk kejujuran. Pada kenyataannya hal-hal tersebut berbeda dan tak dapat disamakan. Berbicara tentang integritas berarti berbicara tentang konsistensi antara dua hal, yaitu pikiran dan tindakan, dalam bentuk pengambilan keputusan. Integritas sering dipahami dalam konteks perilaku, dan perilaku integritas pada umumnya dipahami dalam kaitannya dengan etika dan moral. Keadaan berperilaku dengan integritas diharapkan muncul bukan hanya karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan seseorang untuk berintegritas, tetapi karena individu tersebut memahami dengan baik bahwa memiliki integritas adalah bagian dari proses untuk membangun sesuatu yang lebih baik di dalam keluarga, organisasi, atau negara.

Kata kunci: integritas, akademik, perilaku, keputusan etis

PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai konsep integritas sangat penting agar kita dapat memahami apa sebenarnya integritas itu dan gagasan dasarnya. Dengan memahami konsep integritas, dapat diketahui mengapa itu penting untuk dipahami oleh seluruh masyarakat, terutama para pemangku kepentingan, dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hukum dilingkungannya, seperti KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Keadaan berperilaku dengan integritas diharapkan muncul bukan hanya karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan seseorang untuk berintegritas, tetapi karena individu tersebut memahami dengan baik bahwa memiliki integritas adalah bagian dari proses untuk membangun sesuatu yang lebih baik di dalam keluarga, organisasi, atau negara.

Integrasi berasal dari bahasa Inggris "integration" yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integritas juga telah didefinisikan dengan menekankan konsistensi moral, keutuhan pribadi, atau kejujuran (di dalam bahasan akademik misalnya) (Jacobs, 2004). Di dalam penelitian di bidang seleksi karyawan, tes terhadap integritas dilakukan dengan mengukur beberapa variabel yang di antaranya adalah kejujuran dan penalaran moral (Berry, Sackett, Wiemann, 2007; Ones, Viswesvaran, Schmidt, 1995). Kejujuran seakan menjadi bagian tak terpisahkan dari bahasan tentang integritas. Di dalam literatur tentang organisasi dan sumber daya manusia, integritas paling sering dikaitkan dengan kejujuran individu (Yulk & Van Fleet, 1992). Hal yang sama juga dilakukan oleh Butler dan Cantrell (1984, di dalam Hosmer, 1995) yang mengartikan integritas sebagai reputasi dapat dipercaya dan jujur dari seseorang untuk menjelaskan istilah "kepercayaan" di dalam konteks organisasi. Integritas juga ditempatkan sebagai sebagai inti etika keutamaan yang digagas oleh Solomon (1992) dengan menyebut integritas tidak hanya tentang otonomi individu dan kebersamaan, tetapi juga loyalitas, keserasian, kerjasama, dan dapat dipercaya.

Meski demikian, apakah memang integritas dapat disamakan dengan kejujuran ataukah sifat dapat dipercaya? Lain lagi, DeGeorge (1993) berpendapat bahwa bertindak dengan integritas dan bertindak etis adalah sinonim, meski secara literal tidak ada konotasi moral di dalamnya. Satu hal yang tidak menjadi kontroversi di dalam literatur etika bisnis tentang konsepsi istilah integritas mungkin hanyalah bahwa integritas adalah

suatu hal yang baik dan penting di dalam kehidupan organisasi (Audi & Murphy, 2006). Integritas sering dipahami dalam konteks perilaku, dan perilaku integritas pada umumnya dipahami dalam kaitannya dengan etika dan moral (Carter, 1996, dalam Supriyadi, 2012).

Penggambaran seseorang yang berintegritas adalah dengan menggambarkan perilaku orang tersebut. Perilaku yang berintegritas di antaranya : a) Jujur; b) Konsisten antara ucapan dan tindakan; c) Mematuhi peraturan dan etika berorganisasi; d) Memegang teguh komitmen dan prinsip-prinsip yang diyakini benar; e) Bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan resiko yang menyertainya; f) Kualitas individu untuk mendapatkan rasa hormat dari orang lain; g) Kepatuhan yang konsisten pada prinsip-prinsip moral yang berlaku di masyarakat; h) Kearifan dalam membedakan benar dan salah serta mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama.

Indikator perilaku ini menggambarkan bahwa harapan terhadap seseorang yang berintegritas adalah seseorang yang dapat diandalkan dan dipercaya. Integritas secara aktif terinternalisasi sebagai rasa keutuhan dan keseimbangan dalam individu yang menyadari konteks diri dan memiliki keyakinan moral, serta konsisten untuk mewujudkannya kedalam perilaku, tanpa harus merasa malu dan berani untuk menyebarkan keyakinannya. Proses yang dinamis tersebut akan menuntun individu menuju pada pemenuhan identitas diri dengan tanggung jawab moral dan tindakan yang penuh rasa syukur. Integritas adalah sebuah konstruk psikologis yang dinamis berdasarkan berfungsinya kepribadian dengan baik yang dikelola oleh fungsi kognitif dan afektif, dan didukung oleh kemampuan tertentu untuk mewujudkannya ke dalam perilaku integritas. Pengertian ini menggambarkan bahwa integritas melekat pada individu sebagai bagian dari proses kehidupannya.

Juliefi memberikan definisi integritas, yaitu konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Suatu konsep yang menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Sedang lawan dari integritas adalah hipokrit (munafik). Ciri-ciri seseorang yang berintegritas, ditandai oleh :

- a. Satunya kata dan perbuatan bukan seorang yang kata-katanya tidak dapat dipegang/dipercaya/diikuti. Dalam bahasa jawa : mencla-mencle atau esuk dele sore tempe.
- b. Bukan tipe manusia dengan banyak wajah (dasa muka) dan penampilan yang disesuaikan dengan motif dan kepentingan pribadinya.

Tulisan ini bertujuan untuk merumuskan bagaimana integritas sebaiknya dipahami dalam konteks akademik maupun secara non akademik. Pemahaman ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran lebih baik bagaimana konsep integritas diterapkan di dalam tindakan sehari-hari di civitas akademika maupun diluar civitas akademika.

PEMBAHASAN

2.1 Jenis Integritas Akademik

Secara umum, integritas dapat dikelompokkan menjadi integritas akademik dan non-akademik. Jenis - jenis integritas akademik antara lain :

1. Absen : ketidak hadiran pada kegiatan pembelajaran dengan ataupun tanpa alasan yang dapat dibuktikan. Alasan yang dapat dibuktikan : sakit (surat keterangan sakit oleh dokter), melakukan tugas instansi (dengan surat keterangan dari atasan atau instansi), atau tugas yang diberikan oleh tempat studi (dengan surat keterangan dari minat atau program studi), dan musibah yang dialami oleh keluarga inti (yaitu sakit keras yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit serta meninggal dunia).
2. Plagiarisme : menggunakan pemikiran, proses, hasil tulisan ataupun tulisan orang lain, baik yang dipublikasikan ataupun tidak tanpa memberikan pengakuan atau penghargaan dengan sumber referensinya secara lengkap. Plagiarisme merupakan masalah integritas akademik yang serius. Contoh : mengambil tulisan orang lain tanpa menyebut sumber referensinya sehingga mengakuinya sebagai tulisan sendiri.
3. Curang (cheating) : setiap usaha yang dilakukan oleh mahasiswa atau orang lain secara tidak jujur yang bertujuan untuk mengambil keuntungan yang tidak adil

dalam proses pembelajaran ataupun penilaian. Contoh : mencontoh jawaban atau membantu mahasiswa lain dalam ujian, menggunakan materi akademik milik lembaga/instansi lain untuk kepentingan luas tanpa seijin lembaga/instansi yang membuat materi tersebut.

4. Kolusi : bekerja sama dengan mahasiswa lain untuk mempersiapkan atau mengerjakan penugasan yang akan dinilai. Contoh : mengerjakan tugas individual secara bersama-sama.
5. Fabrikasi : mengarang data atau hasil penelitian ataupun dalam mencatat atau melaporkan hasil penelitian tersebut.
6. Falsifikasi : memanipulasi material, peralatan, atau proses penelitian, atau mengubah, atau menghilangkan data atau hasil penelitian sehingga hasil penelitian tidak tercatat secara akurat.
7. Ghosting : meminta jasa orang lain (dengan atau tanpa insentif) untuk menuliskan atau mengerjakan penugasan untuk mahasiswa tertentu. contoh : penugasan, laporan, skripsi/tesis yang dituliskan orang lain (ghost writer).
8. Deseit : pernyataan, tindakan, alat atau piranti yang digunakan secara tidak jujur untuk tujuan berbohong atau memberikan kesan negatif. Contoh : memberikan pernyataan sakit sebagai alasan menunda pengumpulan penugasan, meskipun sesungguhnya mahasiswa tersebut sehat.
9. Gratifikasi : tindakan untuk menyenangkan orang lain yang dapat memberikan keuntungan bagi mahasiswa tersebut. Contoh : memberikan hadiah kepada penguji sebelum pelaksanaan ujian.

2.2 Jenis Integritas Non-akademik

1. Impersonasi: membuat pernyataan tentang, menirukan ucapan, gerakan, tindakan orang lain dengan tujuan mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Contoh: menyatakan bahwa tugas kelompok tersebut sebenarnya hanya dilakukan oleh mahasiswa tertentu (meskipun hal tersebut tidak benar).
2. Pelecehan: tindakan yang merendahkan martabat orang lain, dapat berupa pelecehan intelektual dan seksual, baik kepada sesama mahasiswa, staf non-

akademik ataupun dosen. Contoh pelecehan intelektual adalah seorang mahasiswa membuat pernyataan yang menjelekkan mahasiswa lain dalam diskusi kelompok ataupun kuliah. Pelecehan seksual dapat dilakukan secara verbal ataupun melalui tindakan tertentu.

3. Merokok: Saat pelaksanaan perkuliahan di dalam kelas merupakan kawasan tanpa rokok (KTR). Dengan demikian, seluruh sivitas akademika tidak diperbolehkan merokok di lingkungan kelas saat perkuliahan STIE SEMARANG, baik selama ataupun di luar jam kerja.
4. Penggunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya: seluruh mahasiswa pascasarjana dan sivitas akademika tidak diperbolehkan menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kampus STIE SEMARANG.
5. Perilaku yang berlebihan: memuji yang berlebihan, perkelahian, ancaman terhadap sivitas akademika (bullying).
6. Pencurian, perusakan atau tindakan kriminal lainnya: keterlibatan atau melakukan pencurian dan perusakan fasilitas yang tersedia di lingkungan kampus.

1.3 Prinsip-Prinsip Dasar Integritas

1. Integritas adalah sebuah nilai, suatu aspirasi, tetapi juga secara konteks merupakan keterpaduan norma. Sehingga integritas mampu menjadikan seorang individu memiliki karakter dan nilai-nilai dasar sebagai benteng penyakit-penyakit sosial, seperti korupsi, manipulasi, kolusi, nepotisme, dan lain-lain.
2. Nilai moral dan prinsip etika merupakan komponen dasar dari pendidikan integritas, tetapi belum cukup untuk membuat perubahan. Dibutuhkan pembentukan kompetensi etis dengan keterampilan-keterampilan tertentu yang aplikatif. Diantaranya adalah kemampuan mendiagnosa kesenjangan integritas, mengidentifikasi masalah dengan pertimbangan etika, memiliki pengetahuan hukum, dan memiliki komitmen, keyakinan serta tanggung jawab moral.
3. Perilaku integritas adalah fungsi interaksi antara akuntabilitas, kompetensi, dan etika minus korupsi.

4. Pendidikan integritas membangun kekuatan-kekuatan individu/organisasi dari dalam dan identifikasi peluang-peluang eksternal. Sementara, pendidikan anti korupsi terfokus pada pemahaman dan penanganan kelemahan dan ancaman.

1.4 Integritas Sebagai Bentuk Loyalitas

Dalam etika objektivisme, integritas diartikan sebagai loyalitas terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang rasional (Peikoff, 1991). Meski objektivisme sendiri sebenarnya mendapat banyak kritik ketika digunakan sebagai pondasi dasar pengembangan etika karena sifat etikanya yang egoistik (lihat Rand, 1964; dan keberatan terhadap objektivisme dalam Barry & Stephens, 1998), aksioma objektivisme dapat membantu mengembangkan konsep integritas. Pada intinya, objektivisme menekankan bahwa realitas berada terpisah dari kesadaran manusia dan manusia yang berkesadaran itu berhubungan dengan realitas melalui akal budinya melalui proses pembentukan konsep dan logika. Dan karena memiliki kesadaran dan akal budi, manusia memiliki kemampuan untuk berpikir atau tidak berpikir, dan karenanya dapat memilih alternatif-alternatif tindakan yang ada.

Hal pertama yang dapat ditarik dari konsepsi objektivisme terhadap integritas adalah bahwa integritas adalah sebuah bentuk loyalitas, yaitu keteguhan hati seseorang untuk memegang prinsip dan nilai moral universal. Prinsip moral adalah norma, yaitu aturan moral yang menganjurkan atau melarang seseorang untuk berbuat sesuatu. Dasar dari prinsip moral itu adalah nilai moral. Prinsip moral untuk tidak membunuh orang lain ataupun diri sendiri berdiri di atas pemikiran bahwa kehidupan adalah sesuatu yang bernilai moral secara universal.

Hal kedua adalah bahwa integritas bukan tentang perkataan semata, tetapi juga mencerminkan tindakan yang sejalan dengan prinsip dan nilai moral universal dan rasional (Becker, 1998). Di sini loyalitas terhadap prinsip atau nilai itu diwujudkan dalam bentuk tindakan, di mana loyalitas itu ditunjukkan sebagai keteguhan hati seseorang untuk bertindak sejalan dengan prinsip atau nilai yang dipegangnya itu. Meski demikian, hal ini tidak berarti bahwa tidak ada kemungkinan bagi seseorang untuk berubah, bahkan seseorang memiliki kewajiban untuk mengubah pandangannya bila apa yang selama ini dipegang olehnya salah (Peikoff, 1991; Becker, 1998).

Hal ketiga, integritas bukan sekadar bertindak sejalan dengan suatu prinsip atau

nilai, tetapi prinsip atau nilai objektif yang dapat dibenarkan secara moral. Pembeneran ini pun harus menggambarkan kesimpulan yang diperoleh melalui prinsip-prinsip logika (Peikoff, 1991), bukan emosi belaka. Prinsip - prinsip dan nilai-nilai moral adalah hal yang objektif yang konseptualisasinya dibangun melalui pengalaman nyata dan persepsi inderawi terhadap obyek dan kondisi aktual (Becker, 1998). Itu sebabnya integritas membutuhkan lebih dari sekadar loyalitas kepada prinsip dan nilai moral yang dipercaya benar oleh individu ataupun disetujui oleh kelompok masyarakat atau organisasi tertentu. Integritas bukan sekadar tentang bertindak sesuai dengan nilai yang diterima oleh individu, masyarakat, ataupun organisasi (Mayer, Davis, & Schoorman, 1995; Treviño-Rodríguez, 2007), tetapi merujuk pada prinsip moral universal yang dapat dibenarkan secara rasional, di mana kriteria-kriteria pembeneran itu objektif. Opini subjektif, baik itu di taraf individu, masyarakat, ataupun organisasi, tidak dapat menjadi dasar bagi integritas moral.

1.5 Integritas Moral dalam Pengambilan Keputusan Etis

Ketika diterapkan pada konsep pengambilan keputusan etis, integritas dapat diartikan sebagai bentuk konsistensi antara hasil keputusan yang diambil dan tindakan aktual yang dilakukan. Pengambilan keputusan etis, yaitu keputusan yang berkaitan dengan nilai etis (moral), dilakukan melalui empat tahapan: sensitivitas etis, penalaran etis, motivasi etis, dan implementasi etis (Rest, 1986). Di dalam model yang disebutkan sebagai Model Empat Komponen (*Four Component Model*), Rest menggambarkan bagaimana proses internal pengambilan keputusan etis melatarbelakangi tindakan seseorang.

Tahapan pertama, sensitivitas moral, mengandaikan kebutuhan akan kesadaran moral atau kemampuan mengidentifikasi isu-isu moral. Di dalamnya terjadi proses interpretasi di mana seorang individu mengenali bahwa suatu masalah moral ada di dalam situasi yang dihadapi atau bahwa suatu prinsip moral menjadi relevan di dalamnya. Tahap ini dinilai kritis karena kemampuan mengidentifikasi signifikansi moral dari suatu isu berperan besar dalam mengawali sebuah proses pengambilan keputusan etis dan juga perilaku etis.

Hasil identifikasi isu-isu moral menghasilkan suatu gambaran dilema moral

beserta alternatif tindakan yang dapat dilakukan. Pengambilan keputusan tindakan mana yang sebaiknya diambil bukanlah sebuah proses pemilihan secara acak. Pemutusan harus berdasarkan penalaran yang tepat yang memperhatikan prinsip-prinsip moral yang relevan di dalam proses penalaran etis. Alternatif tindakan yang telah diambil pun membutuhkan ketetapan hati maupun dorongan untuk melakukannya. Itulah yang disebut motivasi etis yang kemudian diikuti oleh implementasi etis di mana alternatif tindakan yang dipilih dilakukan secara nyata. Integritas terjadi ketika implementasi tindakan yang dilakukan konsisten dengan prinsip moral yang digunakan sebagai pegangan dalam membuat keputusan di tahap penalaran etis yang di dalamnya kesadaran moral berperan secara dominan. Itu sebabnya konsistensi terhadap prinsip moral disebut sebagai integritas moral. Kohlberg (1995) menekankan pentingnya perhatian kepada kesadaran moral ini untuk memahami bagaimana keputusan etis diambil dan juga alasan etis mengapa seseorang mengambil keputusan tertentu (Rest, 1986; Trevino, 1992). Satu hal yang mendasar dari konsep ini adalah bahwa kesadaran moral tidak ditentukan oleh perasaan, melainkan oleh kemampuan intelektual, yaitu kemampuan untuk memahami dan mengerti sesuatu secara rasional (Magnis-Suseno, 2000).

Dalam menjelaskan teori ini, Kohlberg tidak berbicara tentang prinsip moral tertentu, tidak bicara tentang apa yang benar dan tidak secara moral, melainkan meneliti kompetensi untuk memberikan penalaran etis. Ia tidak mengatakan apakah tindakan seorang nenek mencuri susu demi cucunya yang kelaparan, misalnya, adalah etis atau tidak etis, melainkan apakah tindakan mencuri susu itu disetujui ataupun tidak disetujui dibenarkan secara memadai (Arbuthnot & Faust, 1980).

Di dalam tipologi yang dikembangkan oleh Kohlberg, ada tiga tingkat dasar penalaran berbeda terhadap isu moral, yang masing-masing dinamai tingkat pre-conventional, conventional, dan post-conventional. Tiap tingkatan tersebut masing-masing memiliki dua tahap yang menjadikan seluruhnya ada enam tahap penalaran. Semua tingkat dan tahap ini dapat dipandang sebagai pemikiran moral sendiri, pandangan yang berbeda mengenai dunia sosio-moral (Crain, 1985).

Pada tingkat pre-conventional, yang meliputi tahap 1 dan 2, seorang individu memahami pengertian benar dan salah berdasarkan konsekuensi yang diterimanya,

misalnya hukuman, hadiah, atau pemenuhan kebutuhan pribadi. Secara ringkas, tahap pertama digambarkan sebagai orientasi terhadap kepatuhan dan hukuman. Pada tahap pertama, seseorang mengasosiasikan penilaian baik dan buruk dengan konsekuensi fisik dari suatu tindakan.

Ketika seseorang menerima hukuman atas tindakannya, maka ia akan memahami bahwa tindakannya itu salah. Dibandingkan dengan modus penalaran tahap pertama, tahap kedua merepresentasikan penalaran yang menilai apa yang baik itu dalam rangka pemenuhan kepentingan pribadi seseorang. Orang mulai dapat memahami bahwa orang lain memiliki kebutuhan individualnya sendiri dan bahwa organisasi sosial dibangun atas dasar pertukaran seimbang antara kepentingan satu orang dengan kepentingan orang lain. Baik penalaran pada tahap pertama dan kedua ini bersifat egosentrik.

Pada tingkat konvensional, yaitu tahap 3 dan tahap 4, individu memahami benar atau tidak secara moral sebagai kesesuaian keputusan yang diambil dengan harapan orang lain atas dirinya, baik dalam konteks relasi interpersonal (tahap 3) dan pelaksanaan peran individu di dalam sistem sosial yang lebih luas dan abstrak (tahap 4). Pada tahap ketiga, keputusan yang baik adalah keputusan yang mengakomodasi harapan orang lain, melakukan apa yang "baik" di mata orang lain, apa yang disetujui oleh orang lain, berperilaku sesuai dengan permintaan seseorang, atau bersikap loyal dan dapat dipercaya kepada kelompok dekat.

Perspektif sosial individu pada tahap ini menunjukkan kesadaran akan harapan dan kesepakatan mutual, perasaan atau cara pandang orang lain, dan bahwa kepentingan kelompok sosial lebih besar daripada kepentingan diri sendiri. Pada tahap keempat, apa yang benar adalah melaksanakan kewajiban yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mempertahankan kelompok sosial sebagai satu kesatuan. Mereka yang ada di tahap keempat ini memahami bahwa tanpa ada standar hukum yang sama, kehidupan manusia akan kacau balau, di mana ia sudah dapat menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas. Hukum dipandang sebagai jaminan atas interaksi interpersonal, kenyamanan, dan hak-hak personal.

Pada tingkat penalaran moral post-conventional, yaitu tahap 5 dan 6, individu

bergerak ke pemahaman moral yang lebih dalam lagi dan lebih universal. Pada tahap kelima, seseorang menyadari bahwa ada aturan relatif dan ada hak dan nilai yang non-relatif (absolut). Aturan relatif ada dalam konteks kelompok masyarakat tertentu dan harus dijunjung karena merupakan dasar kontrak sosial. Di sisi lain, hak dan nilai non-relatif, seperti misalnya hak untuk hidup dan hak atas kebebasan, harus dijunjung terlepas dari opini publik atau kehendak mayoritas.

Pada tahap keenam, seseorang mulai beralih ke prinsip moral universal yang diikuti bukan karena disetujui secara komunal di dalam kontrak sosial, tetapi karena berasal dari kesamaan hak asasi manusia dan rasa hormat terhadap kemanusiaan dan martabat individu. Faktor kritis dalam menentukan apa yang secara etis benar adalah prinsip moral yang universal, konsisten, komprehensif, dan logis yang ada di dalam hati nurani yang bukan berdasar pada rasa takut dan rasa bersalah. Hal ini terkait dengan penilaian otonom di mana seseorang harus menentukan apakah suatu tindakan sejalan dengan apa yang dipercaya berlaku secara universal.

Dalam menjelaskan etis tidaknya suatu tindakan, teori perkembangan moral kognitif melihat bahwa tindakan yang sama yang dilakukan dapat dilatari oleh kesadaran moral yang berbeda. Misalnya perilaku tidak mencontek yang dilakukan oleh mahasiswa dapat disebabkan oleh rasa takut akan konsekuensi tidak mendapatkan nilai, teman-teman yang tidak mencontek, kesadaran akan tanggung jawab sebagai mahasiswa, penghargaan hak intelektual, dll (Wisesa, 2009). Artinya, analisa perilaku individu di dalam pengambilan keputusan etis tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat perilaku yang ditunjukkan, tetapi juga prinsip moral yang dipegangnya yang melatarbelakangi perilakunya tersebut. Hal ini juga penting untuk dilakukan untuk menilai integritas moral individu.

PENUTUP

1. Pemahaman kepada makna integritas tidak cukup hanya dibahas pada skala perilaku yang ditunjukkan oleh individu ataupun prinsip moral yang dipegang oleh individu. Integritas mencakup keduanya. Karenanya, kajian dan penilaian terhadap integritas harus meliputi baik pemahaman terhadap prinsip moral yang dipegang oleh

individu dan perilaku yang ditunjukkan. Prinsip moral itu sendiri haruslah dibangun di atas nilai moral universal sehingga tindakan yang dilakukan menurut prinsip moral itu benar-benar bernilai etis. Itulah sebabnya tidak mudah mengatakan suatu tindakan seseorang sebagai berintegritas. Integritas bukan sekadar istilah yang merujuk pada perilaku etis, tetapi lebih jauh dalam lagi, integritas mengandaikan tingkat pemahaman moral yang universal yang secara rasional dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini membawa implikasi bahwa tidak setiap perilaku etis dapat dinilai sebagai tindakan berintegritas dan hanya perilaku etis yang dilakukan atas dasar prinsip dan nilai moral universal yang dapat dikatakan berintegritas moral.

2. Kita perlu memahami dengan baik konsep dasar integritas, karena integritas adalah kompas yang mengarahkan perilaku seseorang, sehingga integritas merupakan gambaran keseluruhan pribadi seseorang yang merupakan bagian dari proses untuk membangun sesuatu yang lebih baik.
3. Seseorang dikatakan “mempunyai integritas” apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan dan prinsip yang dipegangnya.
4. Tanpa integritas, motivasi menjadi berbahaya ; tanpa motivasi, kapasitas menjadi tak berdaya; tanpa kapasitas, pemahaman menjadi terbatas; tanpa pemahaman, pengetahuan tidak ada artinya; tanpa pengetahuan, pengalaman menjadi buta.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara Wisesa. (2011). “*Integritas Moral dalam Konteks Pengambilan Keputusan Etis*”. Jurnal Manajemen Teknologi Volume 10 Number 1, pp 82-92. Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung
- Arbuthnot, J. B. dan Faust, D. (1980). *Teaching Moral Reasoning: Theory and Practice*, New York: Harper & Row.
- Audi, R. dan Murphy, P. E. (2006). “The Many Faces of Integrity”, *Business Ethics Quarterly*, Vol 16 Issue1, pp 30-21.
- Barry, B. dan Stephens, C. U. (1998). “Objections to An Objectivist Approach to Integrity”, *Academy of Management Review*, Vol 23 No 1, pp 162-169.
- Becker, T. E. (1998). “Integrity in Organizations: Beyond Honesty and Conscientiousness”, *Academy of Management Review*. Vol 23 No 1, pp 154-161.
- Berry, C. M., Sackett, P. R., dan Wiemann, S. (2007). “A Review of Recent Developments in Integrity Test Research”, *Personnel Psychology*, Vol. 60 No. 2, pp 271-301.
- Crain, W.C. (1985). *Theories of Development*, New Jersey: Prentice Hall.
- De George, R. T. (1993). *Competing with Integrity in International Business*, New York: Oxford University Press.
- Didik Supriyadi. (2012) “*Integrasi Akademik*”, MMR FK UGM – www.mmr.ugm.ac.id
- Jacobs, D. C. (2004), “A Pragmatist Approach to Integrity in Business Ethics”, *Journal of Management Inquiry*, Vol. 13 Issue 3, pp 215-223.
- Kohlberg, L. (1995). *Tahap-tahap Perkembangan Moral*, diterjemahkan oleh John de Santo dan Agus Cremers, Yogyakarta: Kanisius.
- Magnis-Suseno, F. (2000). *12 Tokoh Etika Abad Ke-20*, Yogyakarta: Kanisius.
- Mayer, R. C., Davis, J. H., dan Schoorman, F. D. (1995). “An Integrative Model of Organizational Trust”, *Academy of Management Review*, Vol 20, pp 709-734.
- McFall, L. (1987). “Integrity”, *Ethics*, Vol 98, pp 5-20.

- McShane, S. L. dan M. A. Von Glinow (2003). *Organizational Behavior*, 2nd ed, Boston: McGraw-Hill Irwin.
- Muliadi Hanada. (2012) “*Makalah Integrasi*”. Blog- net
- Ones, D. S., Viswesvaran, C., dan Schmidt, F. L. (1995). “Integrity Tests: Overlooked Facts, Resolved Issues, and Remaining Questions”, *American Psychologist*, Vol. 50, pp 456-457.
- Peikoff, L. (1991). *Objectivism: The Philosophy of Ayn Rand*, New York: Meridian.
- Rand, A. (1964). *The Virtue of Selfishness: A New Concept of Egoism*, New York: New American Library.
- Rest, J. (1986). *Moral Development: Advances in Research and Theory*, New York: Prager.
- Solomon, R. C. (1992). *Ethics and Excellence: Cooperation and Integrity in Business*, New York: Oxford University Press.
- Trevino, L. K. (1992). “Moral Reasoning and Business Ethics: Implications for Research, Education, and Management”, *Journal of Business Ethics*, Vol. 11, pp 445 – 59.
- Trevinyo-Rodríguez, R. N. (2007). “Integrity: A Systems Theory Classification”, *Journal of Management History*, Vol. 13 No. 1, pp 74-93.
- Wisesa, A. (2009). *Orientasi Nilai Integritas dan Keputusan Etis di Balik Pelanggaran Akademik: Pendekatan Perkembangan Kognitif Terhadap Manajemen Perilaku Berbasis Nilai*, Tesis, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Yukl, G. A. dan Van Fleet, D. D. (1992). “Theory and Research on Leadership in Organizations”, di dalam Dunnette, M. D. dan Hough, L. M. (ed), *Handbook of Industrial & Organizational Psychology*, 2nd ed, Vol 3, Palo Alto: Consulting Psychologists Press.